



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2015-2019**



**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2015-2019**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Setjen Wantannas tahun 2015-2019.

Renstra Setjen Wantannas Tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas untuk 5 (lima) tahun ke depan. Disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Setjen Wantannas periode 2010-2014, analisa dinamika terhadap dinamika lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Setjen Wantannas harus melaksanakannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan Visi Renstra Setjen Wantannas periode 2015-2019 yaitu "Menjadi lembaga perumus kebijakan dan strategi yang kredibel, akseptabel dan komprehensif dalam rangka ketahanan nasional" yang harus dievaluasi setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, untuk dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Setjen Wantannas periode 2015-2019 yaitu terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi guna merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan dan ancaman terhadap kedaulatan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara, serta terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Jakarta, 31 Maret 2015

Sekretaris Jenderal  
Dewan Ketahanan Nasional



Waris  
Letnan Jenderal TNI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR ANAK LAMPIRAN</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
A. Peran, Tugas dan Fungsi Setjen Wantannas .....	2
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	3
C. Hasil Capaian Kinerja Setjen Wantannas .....	6
D. Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi dan Kewenangan .....	8
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	9
<b>BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN SETJEN WANTANNAS</b> .....	27
2.1. Visi Setjen Wantannas .....	27
2.2. Misi Setjen Wantannas .....	28
2.3. Tujuan Setjen Wantannas .....	30
2.4. Sasaran Strategis Setjen Wantannas .....	32
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	33
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (Amanat RPJMN 2015-2019) .....	33
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas.....	35
3.3. Kerangka Regulasi.....	37
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	38
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	39
4.1. Target Kinerja.....	39
4.2. Kerangka Pendanaan.....	39
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	41

## DAFTAR TABEL

TABEL 1	PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2014 ... ..	6
TABEL 2	CAPAIAN KINERJA PERIODE 2010-2014 .....	7
TABEL 3	ANALISIS SWOT .....	24
TABEL 4	PENGUATAN PERAN SETJEN WANTANNAS 2015-2019.....	26
TABEL 5	KERANGKA REGULASI .....	37
TABEL 6	KERANGKA KELEMBAGAAN .....	38
TABEL 7	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR.....	39
TABEL 8	SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR DAN PENDANAAN .....	39

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	STRUKTUR ORGANISASI SETJEN WANTANNAS... ..	4
GAMBAR 2	GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN .....	5
GAMBAR 3	PROSES BISNIS SETJEN WANTANNAS... ..	24
GAMBAR 4	LOGIC MODEL ... ..	24

## DAFTAR ANAK LAMPIRAN

ANAK LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN  
SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019

ANAK LAMPIRAN 2 : MATRIK KERANGKA REGULASI



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019 mengamanatkan pedoman ini untuk dijadikan panduan bagi pimpinan Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renstra K/L;
- c. bahwa Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJM Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Setjen Wantannas dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dalam rangka menjamin konsistensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Renstra Setjen Wantannas 2015 -2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan ... ..

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 Tahun 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut Renstra Setjen Wantannas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sesjen ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Sesjen ini.

Pasal 2

Renstra Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Pasal 3 ... .. .

Pasal 3

Renstra Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Renstra Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



WARIS

LETNAN JENDERAL TNI

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN SESJEN WANTANNAS**  
**NOMOR : 1 Tahun 2015**  
**TANGGAL : 31 Maret 2015**



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**  
**TAHUN 2015-2019**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memiliki maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini kemudian dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN (2005-2025). RPJMN tahap ketiga merupakan kelanjutan RPJMN tahap kedua yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah maka Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Setjen Wantannas untuk periode 2015-2019. Penyusunan Renstra Setjen Wantannas ini berpedoman pada RPJMN Periode 2015-2019.

Proses penyusunan Renstra Setjen Wantannas periode 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja periode 2010-2014 serta melibatkan stakeholders yang menjadi mitra Setjen Wantannas. Selanjutnya Renstra Setjen Wantannas periode 2015-2019 diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dibandingkan dengan pencapaian kinerja dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kondisi umum Setjen Wantannas pada saat ini tergambar dalam peran, tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerjanya.

#### **A. Peran, Tugas dan Fungsi Setjen Wantannas.**

Peran, tugas dan fungsi Setjen Wantannas adalah berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Setjen Wantannas adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c) penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Dilihat dari fungsinya, Setjen Wantannas dalam menjalankan tugas utamanya secara garis besar memiliki 3 inti kegiatan atau pilar lembaga Setjen Wantannas, yaitu: (1) menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, (2) menyusun

perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan (3) menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

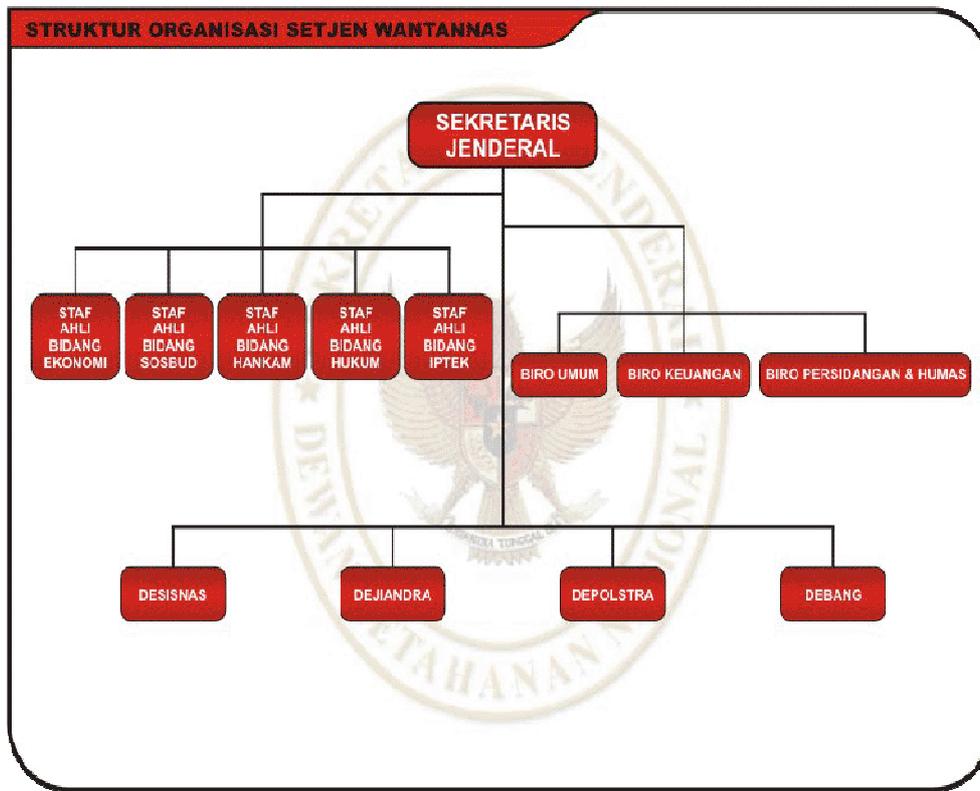
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada “Ke-Setjenan” Dewan Ketahanan Nasional sebagai lembaga yang sangat strategis dalam hal menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan. Dengan Luas wilayah darat Indonesia yang mencapai 1.922.570 km<sup>2</sup> merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Hal ini menjadikan tugas Setjen Dewan Ketahanan Nasional sebagai tantangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perkiraan risiko pembangunan nasional yang akan dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan kebijakan dan strategi merehabilitasi akibat risiko pembangunan tersebut.

Setjen Wantannas melakukan fungsi pembinaan ketahanan nasional secara komprehensif. Mengingat wilayah negara berbentuk kepulauan yang tentu saja terdapat banyak pintu masuk bagi berbagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa Indonesia, menjadi tantangan tersendiri bagi Setjen Wantannas untuk melakukan revitalisasi terhadap kinerjanya dalam menyiapkan kebijakan strategis untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

## **B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas adalah sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional**

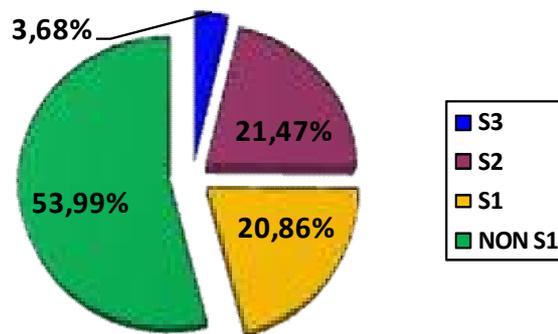


Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 9 unit kerja eselon I, yaitu: Kedeputusan Bidang Sistem Nasional; Kedeputusan Bidang Pengkajian dan Penginderaan; Kedeputusan Bidang Politik dan Strategi; Kedeputusan Bidang Pengembangan; Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Keuangan; dan Biro Persidangan dan Humas.

Kondisi sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsi Setjen Wantannas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Maret 2015, kekuatan sumber daya manusia Setjen Wantannas adalah sebanyak 163 orang, terdiri atas 79 pegawai organik, 58 pegawai perbantuan, dan 26 pegawai diperbantukan. Dari sejumlah itu 6 orang (3,68 %) di antaranya berpendidikan doktor; 35 orang (21,47%)

master; 34 orang (20,86%) sarjana; 88 orang (53,99%) sarjana muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana Gambar 2 dan Tabel 1. Dari pegawai tersebut 88 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 48 orang sebagai tenaga fungsional.

**Gambar 2**  
**Grafik Jumlah Pegawai**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Setjen Wantannas melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat di antaranya diklat penjurangan baik struktural dan diklat fungsional teknis yang sesuai dengan kebutuhan para tata usaha atau dalam menunjang kesekretariatan khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

**Tabel 1**  
**Profil Sumber Daya Manusia Tahun 2014**  
**Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional**

NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	Non S1	
1	Pejabat Negara	-	-	-	1	1
2	Eselon Ia	1	2	-	1	4
3	Eselon Ib	2	1	1	1	5
4	Eselon IIa	2	21	9	5	37

NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	Non S1	
5	Eselon IIb	1	10	3	3	17
6	Eselon III	-	1	4	1	6
7	Eselon IV	-	-	7	12	19
8	Fungsional Umum	-	-	10	38	48
9	Pengemudi	-	-	-	10	10
10	Pengamanan Dalam	-	-	-	4	4
11	Tenaga Kebersihan	-	-	-	8	8
12	Pramusaji	-	-	-	4	4
Jumlah Total		6	35	34	88	163

Dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis merupakan tantangan Setjen Wantannas dapat melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis tersebut.

### C. Hasil Capaian Kinerja Setjen Wantannas

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Setjen Wantannas bertugas: (1) merumuskan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (2) merumuskan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (3) menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Setjen Wantannas tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indicator kinerja utama sesuai sasaran strategis di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Capaian Kinerja**  
**Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional**  
**Periode 2010-2014**

No	Indikator	Target Awal	Target					Realisasi					Rasio				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah saran tindak hasil kajian dinamis, siklus dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional.	329	66	101	130	135	103	66	101	130	135	103	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden.	75%	65%	70%	70%	75%	75%	65%	70%	75%	80%	75%	100%	100%	107%	107%	100%

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama Setjen Wantannas tersebut pada Tabel di atas, bahwa kinerja Setjen Wantannas telah menunjukkan hasil kinerja yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun untuk yang akan datang diharapkan kinerja Setjen Wantannas masih perlu ditingkatkan agar hasil yang diharapkan masyarakat lebih maksimal. Salah satu yang belum maksimal dalam pencapaian kinerja Setjen Wantannas adalah belum optimalnya tindak lanjut hasil kajian dinamis, siklus dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional yang di respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden.

#### D. Identifikasi Isu-isu Strategis.

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Setjen Wantannas tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum maksimal dalam pencapaian kinerja Setjen Wantannas yaitu belum optimalnya tindak lanjut hasil kajian dinamis, siklus dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional yang di respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab permasalahan yang sangat strategis dan penting bagi Peran Setjen Wantannas dalam melakukan pembenahan di masa mendatang sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini diagram yang menunjukkan isu-isu strategis atas permasalahan pokok Setjen Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Setjen Wantannas sebagai lembaga pembina ketahanan nasional masih perlu terus dilakukan penguatan terhadap pencapaian kinerja dimasa akan datang agar dapat memastikan berjalannya proses pembinaan ketahanan nasional yang lebih baik dalam menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan sehingga diharapkan dapat memberikan pengurangan resiko terhadap pembangunan nasional.

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Setjen Wantannas yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Belum efektifnya kebijakan dan strategi ketahanan nasional dalam rangka perkiraan resiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
2. Belum efektifnya pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan.
3. Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Setjen Wantannas perlu terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi khususnya peraturan perUndang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Setjen Wantannas dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan Setjen Wantannas mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim

(*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Setjen Wantannas dalam melaksanakan pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko pembangunan nasional.

Secara garis besar, lingkungan strategis yang dihadapi oleh Setjen Wantannas terdiri atas potensi dan permasalahan. Adapun potensi lingkungan strategis yang dihadapi terkait dengan Ketahanan Nasional, khususnya dalam bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam adalah sebagai berikut:

a. Politik.

Kondisi politik yang dapat dijadikan modal awal untuk pengembangan pembangunan lima tahun ke depan (2015-2019) dan bahan kajian strategik antara lain:

- 1) Dalam bidang politik, Indonesia telah berhasil melewati sebuah proses transformasi politik menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis. Salah satu bagian penting dalam proses transformasi politik itu, adalah terbangunnya proses menuju tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa (*good governance and clean government*).
- 2) Kehidupan demokrasi terus berkembang, kebebasan masyarakat memiliki ruang yang cukup, meskipun di sisi lain kinerja lembaga demokrasi di Indonesia belum optimal, jaminan terhadap hak-hak politik warga masyarakat semakin terbuka. Kinerja lembaga demokrasi juga semakin maju dan masih perlu diperkuat.
- 3) Partisipasi politik semakin meningkat tercermin dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah di berbagai wilayah secara demokratis. Namun demikian masih sering terjadi sengketa pada hasil perhitungan jumlah suara sehingga harus dibawa ke proses peradilan di Mahkamah Konsitusi.
- 4) Reformasi birokrasi terus berjalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara, penerapan manajemen berbasis kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi

secara nasional. Melalui SAKIP instansi pemerintah berupaya menghasilkan produk yang memberikan manfaat (*outcome*) nyata bagi masyarakat serta melaporkan kinerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik.

- 5) Dalam rangka penyelesaian konflik sosial di kalangan masyarakat adanya pelembagaan dialog antara lain dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum Pembaruan Kebangsaan. Selain itu terdapat Nota Kesepahaman Bersama 10 Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelesaian konflik secara damai dalam hal terjadi gangguan keamanan dalam negeri.
- 6) Keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers yang luas menunjukkan proses demokrasi yang semakin membaik. Namun demikian ruang kebebasan pers yang sangat besar perlu diimbangi dengan kebijakan untuk memperbanyak pilihan sumber informasi masyarakat.

b. Hukum.

Kesadaran di bidang hukum dapat dijadikan modal awal untuk pengembangan pembangunan lima tahun ke depan (2015-2019) dan bahan kajian strategik antara lain:

- 1) Semakin berkembangnya aspirasi masyarakat yang menginginkan supremasi hukum dan pembaharuan hukum nasional, semakin mendorong implementasi reformasi bidang hukum, pada gilirannya meningkatkan citra Indonesia di lingkungan masyarakat antarbangsa.
- 2) Sebagai komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi telah ditetapkan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*, ditindak lanjuti diterbitkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 merupakan langkah strategis dalam mensinergikan upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat pusat dan daerah.
- 3) Menguatnya aspirasi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan masyarakat, pada gilirannya melanjutkan pembaharuan pada aspek politik

hukum nasional secara komprehensif. Kecenderungan akan membantu penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum (pemberantasan korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan terorisme), HAM, HAKI, serta sinkronisasi peraturan perUndang-undangan yang dianggap oleh sementara pihak sebagai tumpang tindih dan disharmoni. Menguatnya para penyelenggara fungsi negara untuk melakukan peningkatan pelayanan hukum antara lain peningkatan kualitas aparatur hukum (profesionalisme/kompetensi dan integritas moral) diharapkan akan semakin mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan rasa keadilan.

- 4) Substansi hukum ditunjukkan oleh diundangkannya peraturan perundang-undangan antara lain tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), transfer dana, perpajakan, pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Struktur hukum dicerminkan dengan terbentuknya berbagai lembaga yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan.

Budaya hukum yang mulai tumbuh diberbagai kalangan masyarakat, baik pada elit politik, elit pemerintahan, dan masyarakat luas yang di motori oleh *civil society* yang telah berkembang di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, Pemerintah melakukan ratifikasi berbagai instrument hukum internasional, diantaranya konvensi ECOSOC (*Economic and Social Council*) dan ICCPR (International Convention on Civil and Political Right), konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination all Forms of Discrimination Againts Women*) dan komitmen kedepan untuk meratifikasi UPR (*Universal Periodic Review*) dan *Optional Protocol* CEDAW.

- 5) Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum telah menunjukkan capaian signifikan. Keseriusan KPK untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus korupsi di Lembaga Peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi didukung oleh peran media massa dalam keterbukaan informasi publik yang semakin menguat. Hasilnya dapat dilihat dari

penyelamatan dan pemulihan keuangan negara oleh lembaga penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK.

- 6) Komitmen pemerintah dan DPR untuk menjaga demokrasi dan negara hukum Indonesia serta mengembalikan kewibawaan MK, ditandai dengan persetujuan DPR untuk pengesahan UU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 7) Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 1990 dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga hak asasi manusia termasuk hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

c. Ekonomi.

Bidang ekonomi dapat dijadikan modal awal untuk pengembangan pembangunan lima tahun ke depan (2015-2019) dan bahan kajian strategik antara lain:

- 1) Keberhasilan memacu pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif melalui upaya menjaga kondisi fiskal yang berkelanjutan dan mewujudkan kondisi moneter yang mendukung pertumbuhan dengan inflasi yang terkendali. Memperkuat ketahanan sektor-sektor ekonomi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur, memantapkan sektor keuangan dan meningkatkan investasi.
- 2) Berbagai upaya untuk memperbaiki iklim dan daya tarik investasi telah meningkatkan kepercayaan dunia usaha baik dalam dan luar negeri. Pengelolaan kebijakan makro yang hati-hati, terjaganya stabilitas politik dan keamanan, momentum pertumbuhan serta upaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat ekonomi internasional.
- 3) Indonesia kaya sumberdaya hayati baik di darat maupun di laut yang berpotensi menjadi sumber keunggulan ekonomi di masa depan. Telah dibangun sarana penyimpan koleksi tanaman Indonesia (Herbarium), koleksi

jaringan, kebun raya, penyelamatan terumbu karang guna menjaga dan merawat kekayaan sumberdaya hayati. Produksi perikanan terus meningkat semakin didominasi oleh perikanan budidaya. Sumbangan perikanan terhadap devisa negara semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ekspor hasil perikanan menjadi 16, 1% per tahun. Ekspor produksi kayu serta *transboundary illegal trading of log* dikembangkan pola Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pada bulan September 2013 telah ditandatangani *Voluntary Partnership Agreement* dengan Uni Eropa yang mengakui sertifikasi SVLK produk kayu yang masuk ke 28 negara anggota Uni Eropa.

- 4) UMKM berperan sebagai penyangga perekonomian terutama dalam penciptaan usaha baru dan lapangan kerja. Usaha mikro yang merupakan sumber wirausaha baru juga terus meningkat, dan proporsinya lebih dominan dalam struktur pelaku usaha di Indonesia. Sementara itu peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah usaha menunjukkan adanya usaha yang naik peringkat.
- 5) Koordinasi antarsektor dan antar daerah dalam pembangunan daerah diarahkan pada: (a) penataan ruang dalam penggunaan data dan informasi spasial untuk menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat daya saing nasional; dan (b) optimalisasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dalam pembentukan kawasan strategis. Pemerataan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan serta peningkatan jalur transportasi ke pulau-pulau kecil dan kapal perintis.
- 6) Terkait percepatan pengurangan kemiskinan.
  - (a) Pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan menjadi Klaster I, Klaster II, Klaster III, dan Klaster IV yang bertujuan untuk mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar dan berbasis kewilayahan.
  - (b) Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan telah ditetapkan dalam wujud dukungan konsolidasi dan optimalisasi yang lebih terintegrasi dituangkan dalam kerangka *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) menempuh strategi: (a) pengembangan sistem

perlindungan sosial yang komprehensif; (b) peningkatan pelayanan dasar; dan (c) pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan.

- 7) Pemerintah telah membantu melakukan revitalisasi pasar tradisional sebanyak 466 unit dan mendirikan 70 pasar percontohan. Sementara itu melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus pemerintah terus melanjutkan upaya pembenahan pasar tradisional dengan skala yang lebih kecil serta pembangunan gudang dengan skema Sistem Resi Gudang.

d. Sosial Budaya.

Bidang sosial budaya yang dapat dijadikan modal awal untuk pengembangan pembangunan lima tahun ke depan (2015-2019) dan bahan kajian strategik antara lain:

- 1) Ideologi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup (*way of life*) dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pancasila merupakan rujukan bagi sikap dan perilaku aparatur negara dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Pembangunan bidang agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonis antar kelompok masyarakat agar terwujud kehidupan harmoni sosial dalam masyarakat. Pembentukan aturan sebagai rambu-rambu dalam pengembangan agama, dialog intern dan antar tokoh agama, peningkatan wawasan multikultural bagi guru, penyuluh agama, dan pemberdayaan forum-forum kerukunan umat beragama. Tantangan kedepan adalah menciptakan suasana yang rukun, aman dan damai antar umat beragama, terus mengantisipasi berbagai aksi konflik dan mengungkap jaringan terorisme.
- 3) Pembangunan pendidikan diarahkan pada perluasan pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal. Anggaran pendidikan dalam APBN yang dialokasikan melalui belanja pemerintah dan transfer daerah sudah memenuhi amanat UUD 1945 dan

UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara.

- 4) Sikap sebagian besar masyarakat yang tetap kukuh mempertahankan adat istiadat, budaya, nilai dan norma adat, mampu mempertahankan terpeliharanya kewibawaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, tidak menghambat berkembangnya wawasan global, memungkinkan bangsa Indonesia menguasai hakekat modernisasi.
- 5) Komitmen pemerintah dalam mengendalikan fertilitas, mortalitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan melalui *affirmative action* untuk mengangkat/meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat di seluruh kawasan tanah air.
- 6) Semangat kebersamaan, gotong royong dan toleransi yang masih kuat dianut oleh sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal di daerah perdesaan, merupakan sumber relawan dalam menanggulangi bencana skala besar.

e. Hankam.

Bidang hankam yang dapat dijadikan modal awal untuk pengembangan pembangunan lima tahun ke depan (2015-2019) dan bahan kajian strategik antara lain:

- 1) Keberhasilan aparat keamanan dan aparat penegak hukum Indonesia untuk mengungkap, menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku kejahatan luar biasa dalam waktu yang relatif cepat telah menaikkan kredibilitas dan kesungguhan bangsa Indonesia untuk turut serta secara bersama dengan dunia internasional menanggulangi kejahatan. Kecenderungan semakin meningkatkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan pengelolaan keamanan nasional.
- 2) Reformasi, reposisi, dan rekonstruksi profesionalisme TNI/Polri sesuai matra masing-masing angkatan/Polri, kecenderungan akan memperkuat penyelenggaraan pengelolaan keamanan nasional dan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dan Polri.
- 3) Pengawasan kedaulatan di wilayah udara dan perbatasan antarnegara telah mampu dipenuhi oleh TNI meskipun dengan alutsista yang relatif terbatas.

Kondisi ini akan semakin mendorong pertimbangan peningkatan anggaran pembangunan alutsista.

- 4) Keikutsertaan pasukan Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB secara kuantitas dalam menjaga perdamaian dunia memberi kontribusi terhadap keamanan regional maupun internasional. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak akan semakin mampu menjadi jembatan antara Barat dan Timur yang memiliki perbedaan mendasar pada aspek kultur dan agama yang kerap dipertentangkan untuk memelihara stabilitas keamanan.
- 5) Dinamika pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, realitas menunjukkan terganggu oleh munculnya isu tindak kekerasan, pembunuhan, teror, perusakan dan aksi-aksi kelompok-kelompok bersenjata. Namun demikian pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di Papua terus dilaksanakan berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dimaksudkan agar dalam pencapaian pembangunan didasari pada nilai-nilai perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui Otsus, pemerintah mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah serta mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur dasar, sarana dan prasarana publik. Terbit Perpres No. 65 dan No. 66 Tahun 2011, tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B) serta pelaksana Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dilengkapi dengan rencana aksi untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Diharapkan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan permasalahan dalam lingkungan strategis yang dihadapi Setjen Wantannas dalam bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam adalah sebagai berikut:

a. Politik Hukum.

Ada beberapa permasalahan di bidang politik dan hukum yang harus dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia sejahtera di tengah meningkatnya persaingan global.

- 1) Dewasa ini kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. Hal tersebut telah mendorong agenda penting memantapkan proses desentralisasi untuk memperbesar manfaat optimal yang dapat diambil dalam rangka memperkuat integritas bangsa menghadapi arus globalisasi. Namun demikian harus diakui, sebagian masih bersifat demokrasi prosedural. Masih banyak esensi substansial demokrasi yang belum mampu diimplementasikan dengan optimal.
- 2) Dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Banyak agenda perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun demikian diakui, fungsi hukum sebagai penuntun dalam berkehidupan sehari-hari masih jauh dari harapan.
- 3) Kondisi politik nasional masih diwarnai oleh berbagai pengaruh kepentingan politik di segenap aspek kehidupan nasional. Hasil pembangunan bidang politik cukup signifikan seperti berkembangnya kehidupan berdemokrasi dan menguatnya kedaulatan rakyat. Namun kondisi tersebut belum mencerminkan secara utuh sesuai dengan pengamalan Pancasila. Meskipun dalam proses pematangan demokrasi itu, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititik beratkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan Ketahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik juga harus dititik beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan. Perbedaan dan benturan kepentingan, serta sikap kritis berbagai pihak terhadap Pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati.
- 4) Kondisi kehidupan masyarakat masih disuguhi oleh tontonan berbagai dinamika politik. Pada saat yang bersamaan masih terjadi pertentangan di kalangan elite politik maupun di internal partai politik yang mendistorsi demokrasi dan sangat mempengaruhi kehidupan hukum di tanah air. Otonomi daerah, kearifan lokal dan gejala-gejala ego kedaerahan serta spirit kerukunan beragama yang belum sepenuhnya kondusif sangat

mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

- 5) Penegakan hukum kerap tidak sesuai dengan harapan dan cita hukum masyarakat baik ditinjau dari instrumen hukum, lembaga hukum, maupun sanksi hukum. Proses hukum sering tercederai oleh kepentingan politik, tekanan massa, kekuasaan finansial, bahkan pihak asing yang berimplikasi pada pemberian sanksi hukum yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain berbagai substansi dan kelembagaan hukum yang telah diperbaharui belum sepenuhnya efektif dalam penegakan hukum, sikap dan perilaku masyarakat terus terpengaruhi oleh individualisme, pragmatisme, dan hedonisme yang membawa implikasi terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum.
- 6) Semakin tingginya tuntutan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penguatan semangat anti korupsi, peningkatan sinergi antar aparat penegak hukum khususnya pada aspek peradilan korupsi yang menjamin rasa keadilan masyarakat, tidak dijadikan komoditas politik dan politisasi bagi aktor-aktor politik dan parpol
- 7) Pada pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, antara lain mengamanatkan bahwa (1) Dalam menetapkan kebijakan umum Ketahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas); (2) berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum Pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara; (3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas (a) Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu Ketahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara; (b) Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi; (c) Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Dengan demikian maka tugas pokok dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Dewan Pertahanan Nasional (Wanhannas) setara perbedaannya terletak pada ketahanan nasional dan pertahanan nasional.

Terkait dengan hal tersebut, ada sementara pihak yang menyatakan bahwa Setjen Wantannas seyogyanya mengikuti perubahan di atas menjadi Setjen Wanhannas. Realitas kecenderungan dilapangan menyatakan lain, karena ada pihak yang menyatakan bahwa yang diperlukan saat ini bukan Wantannas akan tetapi Dewan Keamanan Nasional hingga saat ini RUU tentang Kamnas masih dalam proses pembahasan. Dalam RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional melalui Peraturan Presiden.

b. Ekonomi.

Ada beberapa permasalahan di bidang ekonomi harus dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah persaingan global yang meningkat.

- 1) Teknologi yang makin maju telah mengurangi kandungan tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Percepatan pembangunan ekonomi juga dibutuhkan bukan hanya mengurangi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan tetapi juga memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan. Agenda pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan berbagai intervensi yang efektif.
- 2) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (*inclusive growth*). Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas memerlukan waktu, dalam kurun waktu tertentu program afirmatif masih dimungkinkan sepanjang sarannya jelas dan terarah. Kesenjangan memiliki banyak dimensi, selain pendapatan juga sumber daya alam dan manusia, infrastruktur dan yang lainnya, demikian juga keterkaitannya dengan bermacam-macam dikotomi seperti dikotomi kota-desa, Jawa-Luar Jawa atau antar daerah. Masalah kesenjangan dalam berbagai dimensi masih merupakan agenda penting dalam pembangunan.
- 3) Kerusakan lingkungan hidup belum sepenuhnya dapat dihentikan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan

menyebabkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi.

- 4) Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup kebakaran hutan menjadi salah satu penyebab utama munculnya penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hiduppun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai asosiasi kuat dengan kerusakan lingkungan hidup. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, maka krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.
- 5) Revitalisasi pertanian memsyaratkan adanya infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki potensi permasalahan jika infrastruktur belum menunjang. Walaupun pemerintah telah meningkatkan pengeluaran dalam bidang infrastruktur, kesenjangan infrastruktur masih terasa baik di tingkat nasional maupun antar daerah.

c. Sosial Budaya.

- 1) Permasalahan yang mendesak terhadap penguatan jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- 2) Kerusuhan sosial dan konflik antar umat beragama kerap terjadi. Di sisi lain tatanan politik dalam proses perubahan secara fundamental dengan pelaksanaan demokrasi, desentralisasi, dan seiring dengan pembentukan/revisi regulasi. Tatanan hidup masyarakat terus mengalami

perubahan secara drastis, yang berimplikasi sebagian lembaga publik, menjadi tidak berfungsi. Proses transisi yang sedang berlangsung, memerlukan pengelolaan secara cermat karena heterogenitas dan kompleksitas persoalan yang harus di atasi segera.

- 3) Jati diri bangsa senantiasa ditunjukkan antara lain oleh tebalnya wawasan kebangsaan dan semangat bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan didorong oleh semangat berdemokrasi sesuai nilai-nilai luhur ideologi Pancasila yang lebih mengedepankan asas musyawarah dalam permufakatan guna menghindari konflik. Dalam implementasinya, pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu ditingkatkan. Memudarnya nilai-nilai Pancasila sering ditunjukkan oleh adanya sebagian perilaku masyarakat antara lain fenomena kerusuhan sosial, anarkisme, separatisme, terorisme, dan tindak kejahatan korupsi.
- 4) Peran media pers masih tetap menjadi salah satu kontrol sosial masyarakat yang paling berpengaruh. Lunturnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, lebih disebabkan kurangnya sosialisasi dan keteladanan. Di sisi lain kelompok ideologi kanan masih terus berupaya menanamkan pengaruhnya di masyarakat, dengan terus memperjuangkan penerapan Syariat Islam dan sistem Khilafah Islamiyah melalui berbagai sarana dan kegiatan. Selain itu, Ideologi kapitalis/neoliberal yang menjadi *mainstream* Negara-negara Barat, juga terus mengembangkan pengaruhnya melalui isu-isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, transparansi dan kebebasan termasuk mempengaruhi proses legislasi. Sejumlah LSM terus menerima bantuan dana dari lembaga-lembaga donor atau NGO untuk melakukan aktivitasnya menyoroti dan mempengaruhi perkembangan demokratisasi dan penanganan masalah HAM.

d. Hankam.

- 1) Permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi semakin mendesak antara lain pembangunan kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum yang disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri sebagai aparat pertahanan keamanan agar mampu melindungi dan

mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan/kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta mendorong kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan negara serta kontribusi industri pertahanan dalam meningkatkan sistem pertahanan negara.

- 2) Klaim wilayah dan sengketa wilayah perbatasan yang belum tuntas diselesaikan secara bilateral, menyimpan potensi konflik pertikaian bersenjata dengan negara tetangga. Pelanggaran wilayah dengan segala manifestasinya seperti eksplorasi dan eksploitasi ilegal sumber kekayaan alam Indonesia, penyelundupan, subversi, infiltrasi yang *link-up* dengan anasir dalam negeri/teroris yang tersebar luas, menjadi fokus perhatian dalam prioritas membangun kapasitas kemampuan di bidang keamanan nasional.
- 3) Instabilitas politik dan keamanan Papua mendesak untuk solusi penyelesaiannya antara lain memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang dalam rangka memberikan *political deterrence* pada RI.
- 4) Semakin pentingnya menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dituangkan dalam program pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

### **Analisa Lingkungan Strategis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT*).**

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah dijelaskan di atas, maka Setjen Wantannas harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh

lingkungan strategis tersebut dapat menjadi suatu peluang bukan ancaman yang dapat mempengaruhi Peran Setjen Wantannas sebagai Lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan ketahanan nasional.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, maka menjadi dasar identifikasi atas kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT untuk menentukan arah strategi dan kebijakan Setjen Wantannas kedepan agar dapat terwujud tujuan dan sasaran organisasi Setjen Wantannas dalam Renstra Periode 2015-2019. Adapun hasil rangkuman analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**ANALISIS SWOT**

<b>SWOT</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>	
Strengths (Kekuatan)	1.	Jumlah SDM yang memadai
	2.	Sarana dan Prasarana yang memadai
	3.	Networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional
	4.	Pedoman Pembinaan ketahanan nasional yang jelas
	5.	Komitmen Pimpinan
Weaknesses (Kelemahan)	1.	Masih rendahnya kualitas SDM
	2.	Manajemen kinerja yang belum optimal
	3.	Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal
	4.	Masih kurangnya dukungan IT
	5.	Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja
Opportunities (Kesempatan)	1.	Negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis.
	2.	Reformasi birokrasi terus berjalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan public
	3.	Koordinasi antarsektor dan antar daerah dalam pembangunan daerah
	4.	Menguatnya aspirasi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan masyarakat
	5.	Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Threats (Ancaman)	1.	Dinamika kehidupan masyarakat masih diwarnai oleh berbagai turbulensi politik
	2.	Kerusakan lingkungan hidup belum sepenuhnya dapat dihentikan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkelanjutan
	3.	Kerusuhan sosial dan konflik antar umat beragama kerap terjadi
	4.	Instabilitas politik dan keamanan di beberapa daerah
	5.	Penegakan hukum kerap tidak sesuai dengan harapan dan cita hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut, maka untuk menghadapi kondisi lingkungan strategis yang semakin kompleks baik secara internal maupun eksternal agar tujuan dan sasaran organisasi Setjen Wantannas periode 2015-2019 dapat terwujud secara optimal maka hasil analisa SWOT tersebut dapat dimaksimalkan dan dimanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman atau resiko yang akan dihadapi Setjen Wantannas. Adapun hasil analisa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu ditingkatkan kualitas kebijakan dan strategi ketahanan nasional dalam rangka perkiraan resiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat resiko pembangunan
- b. Perlu dioptimalkan efektifitas pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan.
- c. Perlu ditingkatkan penguatan kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas.

Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenang Setjen Wantannas sebagai lembaga yang menghasilkan strategi dan kebijakan ketahanan nasional untuk Presiden R.I. maka Setjen Wantannas harus memiliki kelembagaan dengan penguatan Peran dan Kewenangan yang sesuai dengan bisnis proses Setjen Wantannas untuk periode 2015-2019 sebagaimana tabel di bawah ini:

**Gambar 4**  
**Proses Bisnis**



Sesuai dengan bisnis proses Setjen Wantannas pada gambar di atas maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Setjen Wantannas untuk periode 2015-2019 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 4**  
**Penguatan Peran Setjen Wantannas**  
**Periode 2015-2019**

<i>Think Tank</i> Ketahanan Nasional	Penyusunan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka perkiraan resiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko pembangunan
Pembinaan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN SETJEN WANTANNAS**

#### **2.1. VISI SETJEN WANTANNAS**

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, serta mengingat tugas pokok dan fungsi maka Setjen Wantannas memiliki tanggungjawab dalam penyiapan kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional. Tuntutan tugas Setjen Wantannas adalah menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, tetap tegaknya NKRI, dan semangat Bhineka Tunggal Ika melalui penetapan kebijakan dan strategi nasional.

Setjen Wantannas memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengurangan resiko pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan melalui rumusan rancangan kebijakan dan strategi yang diberikan kepada Ketua Wantannas. Kualitas kebijakan dan strategi yang dihasilkan oleh Setjen Wantannas dapat dilihat dari dua hal, pertama yaitu kualitas kebijakan dan strategi yang ditindaklanjuti oleh Presiden dalam rangka pengurangan perkiraan resiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko pembangunan; dan kedua yaitu kualitas pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan.

Jika kedua hal tersebut dapat terpenuhi, maka Setjen Wantannas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, visi dan misi sesuai RPJMN 2015-2019. Adapun visi dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka sesuai dengan tugas dan kewenangan Setjen Wantannas sebagai lembaga yang bertanggungjawab menyiapkan kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional menetapkan Visi 2015-2019 sebagai berikut:

**”Menjadi lembaga perumus kebijakan dan strategi yang kredibel, akseptabel dan komprehensif dalam rangka ketahanan nasional”.**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan kualitas kebijakan dan strategi di bidang ketahanan nasional harus melibatkan *stake holder* serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan negara yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata kredibel, akseptabel dan komprehensif adalah sebagai berikut:

Kredibel : kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.

Akseptabel : keterterimaan, kecocokan dan kepantasan.

Komprehensif : mampu menangkap dengan baik; luas dan lengkap serta memperlihatkan wawasan yang luas terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketahanan Nasional : kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Dengan demikian kebijakan dan strategi yang dihasilkan harus kredibel, akseptabel, komprehensif dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengambilan keputusan di bidang ketahanan nasional dalam rangka mengurangi resiko pembangunan nasional serta keselamatan bangsa dan negara.

## **2.2. MISI SETJEN WANTANNAS**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Setjen Wantannas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab 1 terhadap 3 (tiga) peran Setjen Wantannas. Adapun misi yang akan

dilaksanakan sesuai dengan peran Setjen Wantannas tersebut untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatnya kredibilitas rumusan rancangan ketetapan kebijakan terkait sistem nasional dan strategi menghadapi ancaman dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.**

Setjen Wantannas setiap tahun menyusun kajian yang bersifat siklis jangka pendek dan jangka menengah sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah yaitu: Perkiraan Strategis Nasional; Apresiasi Strategis Nasional; Telaahan Strategis Nasional, dan Rencana Kontijensi Nasional.

Terwujudnya kebijakan dan strategi sistem nasional dan pendeteksian dini negara mencakup aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan. Penetapan kebijakan dan strategi tersebut dengan cara memberikan rekomendasi kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan masukan. Rumusan rekomendasi tersebut berisi substansi hal-hal yang terkait dengan sistem nasional, kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional, dinamika politik nasional dan rencana kontinjensi, serta perkiraan resiko pembangunan nasional.

**b. Meningkatnya pembinaan di bidang ketahanan nasional dalam rangka mengurangi resiko pembangunan nasional dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.**

Pembinaan ketahanan nasional sangat penting untuk melihat seberapa jauh berbagai bentuk perkiraan strategis dapat memberikan pencegahan konflik (*conflict prevention*), solusi konflik (*conflict solution*), pemecahan masalah pertahanan keamanan lainnya (*national defence and security*). Hal ini sangat penting agar sedini mungkin berbagai kemungkinan gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang dan sektor pembangunan dapat diantisipasi dan ditanggulangi dengan risiko sekecil mungkin. Untuk itu, peran Setjen Wantannas dalam melakukan pembinaan di berbagai bidang dan sektor pembangunan nasional harus dapat lebih di optimalkan sesuai dengan berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tercapainya pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara mencakup aspek perkiraan resiko pembangunan

antara lain kehidupan demokrasi, penegakan hukum, aparat penegak hukum, pemberantasan korupsi, kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara, pembangunan ekonomi, infra struktur, eksplorasi SDA dan pembangunan SDM.

Mengurangi resiko pembangunan nasional serta menjamin keselamatan bangsa dan negara dengan cara memberikan bahan masukan rekomendasi kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Rumusan rekomendasi tersebut berisi substansi hal-hal yang terkait dengan sistem nasional, kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional, dinamika politik nasional dan rencana kontinjensi, serta perkiraan resiko pembangunan nasional.

Misi Setjen Wantannas merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Setjen Wantannas juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait. Kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan lainnya merupakan potensi yang perlu diperkuat.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip *Learning Organization*. Untuk mendukung hal tersebut maka Setjen Wantannas perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

### **2.3. TUJUAN SETJEN WANTANNAS**

Berdasarkan 2 (dua) misi tersebut di atas dan penguatan peran serta kewenangan Setjen Wantannas periode 2015-2019, maka Setjen Wantannas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi guna merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan dan ancaman terhadap kedaulatan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara;
- b. Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Tujuan pertama, menjelaskan Setjen Wantannas berkomitmen meredefinisikan konsep keamanan nasional baik pada aspek hukum maupun institusionalnya, pada hakikatnya bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Reformasi Sektor Keamanan (RSK) dilakukan dengan meninjau kembali kewenangan bidang

ketahanan (*external defence*) dan keamanan (*internal security*) serta menata ulang aparaturnegara yang terkait, lengkap dengan berbagai perangkat legal yang baru. Dalam konteks RSK, berbagai reformasi terus dijalankan mulai dari sektor militer, kepolisian, intelijen, hingga hukum agar dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Indonesia juga secara bertahap mengadopsi konsep keamanan insani (*human security*). Keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, keamanan nasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi.

Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin variatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antarinststitusi menyebabkan koordinasi terkait keamanan nasional terkesan silo (kurangnya komunikasi dan tujuan bersama antar institusi), dimana tiap institusi bertindak sendiri-sendiri. Permasalahan ini bermuara pada kebutuhan adanya lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional yang terintegrasi. Munculnya kebijakan pengintegrasian/ penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya dengan lembaga keamanan nasional yang lainnya. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan nasional bidang lainnya. Terwujudnya penguatan kondisi ketahanan nasional dan keamanan nasional dalam negeri akan berdampak positif pada terselenggaranya pembangunan nasional lainnya secara aman dan lancar. Jika terjadi gangguan terhadap kondisi ketahanan nasional, tentunya juga akan mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional lainnya.

Tujuan kedua, menjelaskan kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien. Kapasitas kelembagaan dapat dinilai dari sumber daya yang ada sebagai penggerak organisasi, meliputi 5M (*men, money, materials, methods, and machines*). Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Dengan keterbatasan

ketersediaan sumber daya baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, maka Setjen Wantannas harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Setjen Wantannas sebagai suatu Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat *techno structure* atau teknis semata, namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk ketiga tujuan tersebut di atas, dijelaskan dalam bagian Sasaran Strategis.

#### **2.4. SASARAN STRATEGIS.**

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan pencapaian misi dan tujuan di atas, sesuai dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di Bab I Setjen Wantannas menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- a. Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan.
- b. Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan 2 (dua) sasaran strategis tersebut, maka ukuran keberhasilan tercapainya 2 (dua) sasaran strategis tersebut, sebagai berikut:

- a. Indeks ketahanan nasional.
- b. Indeks kesehatan organisasi.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.**

Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 pada Bab II diatas, untuk mewujudkan visi melalui 7 misi pembangunan antara lain adalah “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”. Selanjutnya dijabarkan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA.

Sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019 pada Bidang Pertahanan dan Keamanan terdapat tiga komponen utama dari hasil formulasi RPJMN tahap III, adalah:

- a. Pertama, RPJMN tahap III merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) yang bervisi mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu di mana untuk bidang pertahanan dan keamanan, visi khususnya ialah penguatan intensif kemampuan pertahanan nasional, keamanan dalam negeri, dan keamanan sosial.
- b. Kedua, RPJMN tahap III juga memperhatikan visi Kabinet Kerja 2015-2019 yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dengan misi khusus pada bidang Ketahanan dan keamanan yang adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- c. Ketiga, RPJMN tahap III ini juga meninjau realita terkini baik domestik, kawasan maupun global yang mempengaruhi kepentingan nasional secara langsung atau tidak langsung.

Di dalam negeri, lingkungan strategis Indonesia diwarnai kestabilan sosio-politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara pada tingkat regional dan internasional terjadi persaingan sebagai hasil dari redistribusi kekuatan dunia yang terkonsentrasi di Asia Pasifik. Berdasarkan pertimbangan ketiga hal di

atas, RPJMN 2015-2019 bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis yang selaras yaitu Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional. Isu strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuh sub-isu strategis untuk periode lima tahun ke depan, yaitu: a) Permasalahan alutsista TNI dan Almitsus Polri dan pemberdayaan industri pertahanan; b) Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit, c) Profesionalisme Polri; d) Peralatan dan koordinasi intelijen; e) Gangguan keamanan wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum dilaut; f) Prevalensi penyalahgunaan narkoba; dan g) Sistem keamanan nasional yang integratif.

Berdasarkan berbagai permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka Setjen Wantannas mempunyai tanggungjawab untuk sasaran bidang yang akan dicapai adalah terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang menjadi tanggungjawab Setjen Wantannas adalah terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif, ditempuh dengan:

- a. Melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks ketahanan nasional;
- b. Meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.
- c. Meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku bela negara di masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka kebijakan dan strategi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang akan dilakukan dalam terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif adalah:

- a. Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
- b. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional.
- c. Pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional.
- d. Perumusan kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak.
- e. Pengendalian dan pemantauan keamanan nasional institusi lainnya.

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SETJEN WANTANNAS

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Setjen Wantannas periode 2015-2109 adalah:

**Arah Kebijakan** yang akan dilaksanakan:

- a. Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan ketahanan nasional.
- c. Menguatnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

**Strategi Setjen Wantannas** yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal, sebagai berikut:

**Eksternal:**

- a. Penguatan sistem keamanan yang komprehensif.
- b. Peningkatan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.
- c. Peningkatan pembinaan ketahanan nasional melalui komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

**Internal:**

- a. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
- b. Meningkatkan kapasitas SDM Setjen Wantannas secara lebih proporsional dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Setjen Wantannas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Setjen Wantannas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis.

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Setjen Wantannas dalam kebijakan dan strategi ketahanan nasional melalui serangkaian kegiatan pengkajian kebijakan dan strategi serta pembinaan bidang keamanan nasional.

b. Program Generik.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Wantannas.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Setjen Wantannas sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan tugas-tugas Setjen Wantannas:

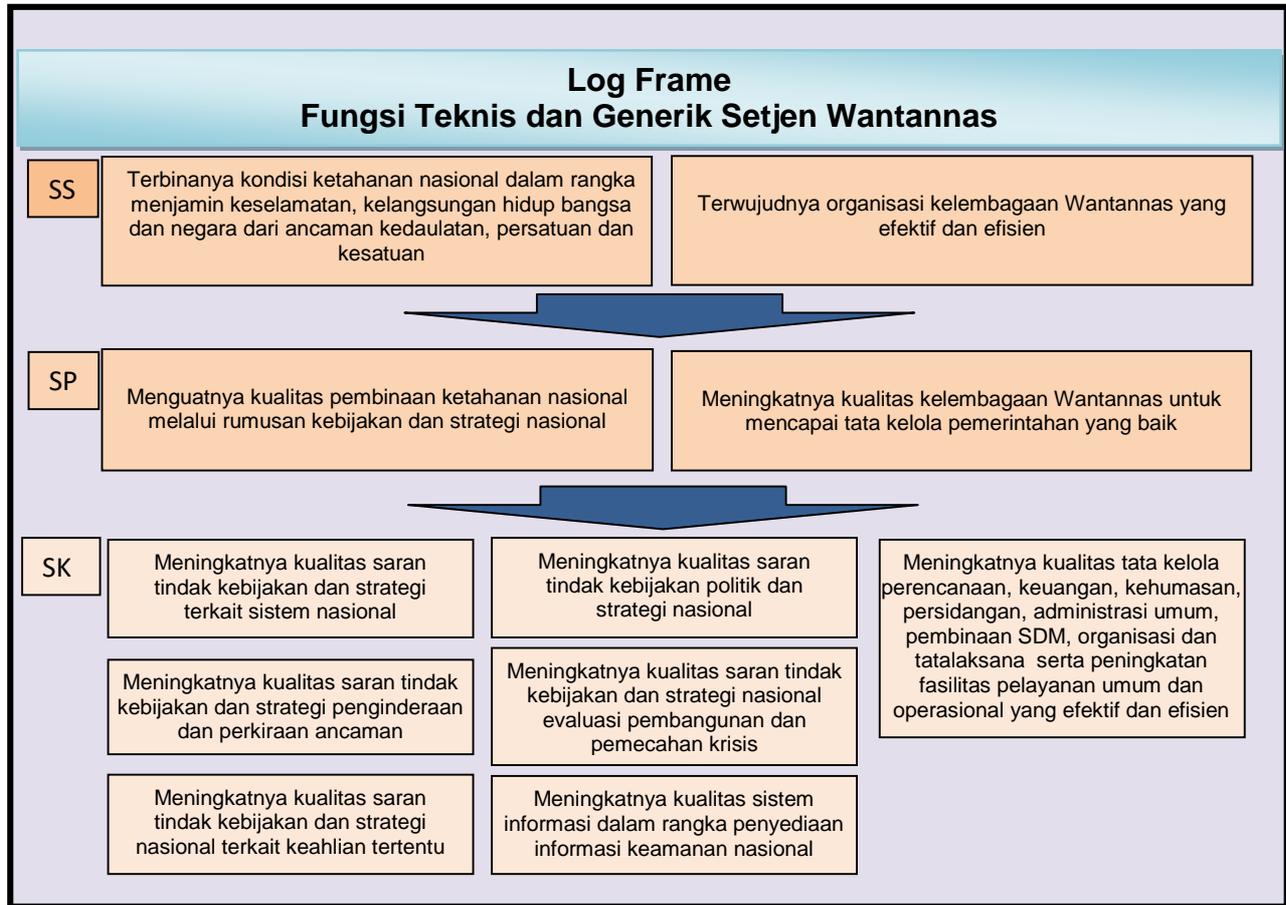
- 1) *Policy brief* yang disampaikan kepada Presiden selaku ketua Dewan Keamanan Nasional.
- 2) Kajian kebijakan keamanan nasional yang bersifat strategis, krusial, dan mendesak.
- 3) Pembinaan Ketahanan Nasional.

b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung):

- 1) Kegiatan pengelolaan perencanaan dan keuangan.
- 2) Kegiatan pengelolaan persidangan dan kehumasan.
- 3) Kegiatan pengelolaan internal perkantoran dan kepegawaian.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis Setjen Wantannas periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan. Adapun *logic model* penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit organisasi di lingkungan Setjen Wantannas adalah sebagai berikut :

Gambar 4  
LOGIC MODEL



### 3.3. KERANGKA REGULASI

Untuk mewujudkan sasaran isu strategis peningkatan kapasitas ketahanan nasional dan stabilitas keamanan dibutuhkan kerangka regulasi sebagai berikut:

Tabel 5  
Kerangka Regulasi Isu Strategis Peningkatan Kapasitas  
Ketahanan Nasional dan Stabilitas Keamanan

No	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
1.	Sistem keamanan nasional yang integratif	Keppres 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	a. UU Tentang Keamanan Nasional. b. Perpres tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional.

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mewujudkan sasaran isu strategis peningkatan kapasitas ketahanan nasional dan stabilitas keamanan dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

Tabel 6  
Kerangka Kelembagaan Isu Strategis Peningkatan Kapasitas  
Ketahanan Nasional dan Stabilitas Keamanan

No	Sasaran Strategis	Kelembagaan Terkait yang Sudah Ada	Kerangka Kelembagaan
1.	Sistem keamanan nasional yang integratif.	Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	a. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional. b. Peningkatan koordinasi pengendalian dan pemantauan keamanan nasional.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. Target Kinerja.**

Sebagaimana sasaran strategis Setjen Wantannas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis: Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan	Indeks ketahanan nasional (bobot 100)	80	82	84	86	88
Sasaran Strategis: Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi (bobot 100)	80	82	84	86	88

**4.2. Kerangka Pendanaan**

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Setjen Wantannas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan**

Sasaran Strategis	Indikator	Alokasi (Rp Milyar)					Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	
Terbinanya kondisi ketahanan	Indeks ketahanan	92,40	276,32	161,87	45,42	46,47	1. Desisnas 2. Dejiandra

Sasaran Strategis	Indikator	Alokasi (Rp Milyar)					Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	
nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan	nasional (bobot 100)						3. Depolstra 4. Debang 5. Staf Ahli
Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi (bobot 100)	51,90	58,38	62,27	66,45	70,93	1. Karoku 2. Karodangmas 3. Karoum

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Setjen Wantannas. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang ditetapkan. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Setjen Wantannas termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Setjen Wantannas.

Renstra Setjen Wantannas periode 2015-2019 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Setjen Wantannas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Evaluasi Renstra Setjen Wantannas ini merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis Setjen Wantannas sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Setjen Wantannas. Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Setjen Wantannas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam Renstra Setjen Wantannas. Hasil evaluasi tersebut disampaikan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya pelaksanaan Renstra. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca-pelaksanaan (*ex post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra Setjen Wantannas untuk menilai efisiensi, efektivitas, ke-ekonomi-an, manfaat, dampak, dan keberlanjutan suatu program. Dalam hal ini yang dimaksud dengan evaluasi terhadap keberlanjutan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, di antaranya:

- a. Apa yang terjadi dengan program/kegiatan setelah aktivitasnya selesai.
- b. Bagaimana target group dapat melakukan aktivitas.
- c. Bagaimana pengelolaan pekerjaan bila pendanaan program/kegiatan selesai.
- d. Apakah program akan dilanjutkan, bagaimana rencana pendanaannya.

Sedangkan kriteria keberlanjutan meliputi kriteria: teknis, manajerial, sosial, dan finansial.

- a. Secara teknis: apakah teknologi dan metoda yang dikembangkan dalam pelaksanaan program telah sesuai. Apakah bahan baku dan peralatan yang

diperlukan dapat diadakan dan dipelihara sendiri oleh penerima manfaat (*beneficiaries*).

- b. Secara manajerial: siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola hasil program yang telah selesai dilaksanakan.
- c. Dari sudut pandang sosial: apakah manfaat program akan terus diterima masyarakat setelah program selesai dilaksanakan.
- d. Secara finansial: bagaimana menutup biaya operasi dan pemeliharaan jika pelaksanaan program dihentikan.

Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan, dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistematis adalah proses pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tata urutan sehingga hasil dan rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan obyektif adalah hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pelaksana kegiatan dan/atau program. Dan yang dimaksud dengan transparan adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban hasil evaluasi harus diketahui oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Setjen Wantannas akan menyediakan informasi berkaitan dengan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Jenderal  
Dewan Ketahanan Nasional,  
  
Waris  
Letnan Jenderal TNI





**ANAK LAMPIRAN I**  
**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**TAHUN 2015-2019**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Anak Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dewan Ketahanan Nasional (052)</b>								<b>144,31</b>	<b>334,71</b>	<b>224,15</b>	<b>111,87</b>	<b>117,41</b>		
	<b>Sasaran Strategis1:</b>							92,40	276,32	161,87	45,42	46,47		B
	Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan .													
	<b>Indikator :</b>													
	Indeks ketahanan nasional (bobot 100)		80	82	84	86	88	92,40	276,32	161,87	45,42	46,47		
	<b>Sasaran Strategis2:</b>							51,90	58,38	62,27	66,45	70,93		K/L
	Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien													
	<b>Indikator :</b>													
	Indeks kesehatan organisasi (bobot 100)		80	82	84	86	88	51,90	58,38	62,27	66,45	70,93		
<b>Program 1:</b>														
<b>Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional</b>								<b>92,40</b>	<b>276,32</b>	<b>161,87</b>	<b>45,42</b>	<b>46,47</b>		B
	<b>Sasaran Program :</b>							92,40	276,32	161,87	45,42	46,47		
	Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi nasional.													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional		33	33	33	33	33	4,33	5,33	5,56	5,79	6,03		
	Jumlah saran tindak kebijakan politik dan strategi nasional		27	27	27	27	27	5,24	6,72	5,45	5,68	5,91		
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional penginderaan dan perkiraan ancaman		25	25	25	25	25	4,16	5,11	5,34	5,56	5,79		
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis		32	32	32	32	32	4,26	5,24	5,47	5,70	5,93		
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu		15	15	15	15	15	1,50	3,35	1,93	2,01	2,09		
	Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional yang ditindaklanjuti		80%	82%	84%	86%	88%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase pemutakhiran sistem informasi dalam rangka penyediaan informasi kemandirian nasional		80%	82%	84%	86%	88%	72,91	250,57	138,12	20,67	20,72		
<b>Kegiatan 1 : Perumusan kebijakan dan strategi sistem nasional bidang lingkungan alam</b>		DKI JAKARTA						1,41	1,74	1,82	1,89	1,97	Bandep Lingal	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output):</b>							1,41	1,74	1,82	1,89	1,97		
	Saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional bidang lingkungan alam													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional bidang lingkungan alam (naskah)		9	9	9	9	9	1,41	1,74	1,82	1,89	1,97		
<b>Kegiatan 2 : Perumusan kebijakan dan strategi sistem nasional bidang lingkungan pemerintahan negara</b>		DKI JAKARTA						0,97	1,20	1,25	1,30	1,36	Bandep Lingpemneg	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							0,97	1,20	1,25	1,30	1,36		
	Saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional bidang lingkungan pemerintahan negara													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional bidang lingkungan pemerintahan negara (dokumen)		8	8	8	8	8	0,97	1,20	1,25	1,30	1,36		
<b>Kegiatan 3 : Perumusan kebijakan dan strategi sistem nasional bidang lingkungan sosial</b>		DKI JAKARTA						0,99	1,22	1,27	1,33	1,38	Bandep Lingsos	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							0,99	1,22	1,27	1,33	1,38		
	Saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional sistem nasional bidang lingkungan sosial													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional bidang lingkungan sosial (naskah)		8	8	8	8	8	0,99	1,22	1,27	1,33	1,38		
<b>Kegiatan 4 : Perumusan kebijakan sistem nasional bidang informasi dan pengolahan data</b>		DKI JAKARTA						0,95	1,17	1,22	1,27	1,32	Bandep Infolahta	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							0,95	1,17	1,22	1,27	1,32		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional bidang informasi pengolahan data													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional bidang informasi pengolahan data (naskah)		8	8	8	8	8	0,95	1,17	1,22	1,27	1,32		
<b>Kegiatan 5 : Perumusan kebijakan politik dan strategi bidang politik nasional</b>														
		DKI JAKARTA						0,95	1,17	1,22	1,27	1,33	Bandep Polnas	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							0,95	1,17	1,22	1,27	1,33		
	Saran tindak kebijakan politik dan strategi bidang politik nasional													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak strategis politik dan strategi bidang politik nasional (naskah)		8	8	8	8	8	0,95	1,17	1,22	1,27	1,33		
<b>Kegiatan 6 : Perumusan kebijakan politik dan strategi bidang strategi nasional</b>														
		DKI JAKARTA						2,53	3,38	1,97	2,05	2,13	Bandep Stranas	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1 :</b>							1,53	1,88	1,97	2,05	2,13		
	Saran tindak kebijakan politik dan strategi bidang strategi nasional													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak strategis politik dan strategi bidang strategi nasional (naskah)		9	9	9	9	9	1,53	1,88	1,97	2,05	2,13		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2 :</b>							1,00	1,50	0,00	0,00	0,00		
	Terbentuknya Dewan Keamanan Nasional melalui Perpres													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah dokumen Pembentukan DKN dan Penguatan organisasinya		1	1	1	1	1	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Kegiatan 7 : Perumusan kebijakan politik dan strategi bidang rencana kontijensi</b>														
		DKI JAKARTA						1,76	2,16	2,26	2,35	2,45	Bandep Renkon	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							1,76	2,16	2,26	2,35	2,45		
	Saran tindak kebijakan politik dan strategi bidang rencana kontijensi													
	<b>Indikator :</b>													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah saran tindak strategis politik dan strategi bidang rencana kontijensi (naskah)		9	9	9	9	9	1,76	2,16	2,26	2,35	2,45		
<b>Kegiatan 8 : Perumusan kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis nasional</b>		DKI JAKARTA						1,72	2,12	2,21	2,30	2,40	Bandep Lingstranas	
<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>								1,72	2,12	2,21	2,30	2,40		
Saran tindak kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis nasional														
<b>Indikator :</b>														
Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis nasional (naskah)			9	9	9	9	9	1,72	2,12	2,21	2,30	2,40		
<b>Kegiatan 9 : Perumusan kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis regional</b>		DKI JAKARTA						1,45	1,78	1,86	1,94	2,02	Bandep Lingstrareg	
<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>								1,45	1,78	1,86	1,94	2,02		
Saran tindak kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis regional														
<b>Indikator :</b>														
Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis regional (naskah)			8	8	8	8	8	1,45	1,78	1,86	1,94	2,02		
<b>Kegiatan 10 : Perumusan kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis internasional</b>		DKI JAKARTA						0,98	1,21	1,26	1,32	1,37	Bandep Lingstraint	
<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>								0,98	1,21	1,26	1,32	1,37		
Saran tindak kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis internasional														
<b>Indikator :</b>														
Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancamanbidang lingkungan strategis internasional (naskah)			8	8	8	8	8	0,98	1,21	1,26	1,32	1,37		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Kegiatan 11 : Perumusan kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang hukum dan perundang-undangan</b>		DKI JAKARTA						0,95	1,16	1,22	1,27	1,32	Bandep Kumdang	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							0,95	1,16	1,22	1,27	1,32		
	Saran tindak kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang hukum dan perundang-undangan													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang hukum dan perundang-undangan (naskah)		8	8	8	8	8	0,95	1,16	1,22	1,27	1,32		
<b>Kegiatan 12 : Perumusan kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang ekonomi</b>		DKI JAKARTA						0,97	1,20	1,25	1,30	1,36	Bandep Ekonomi	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							0,97	1,20	1,25	1,30	1,36		
	Saran tindak kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang ekonomi													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang ekonomi (naskah)		8	8	8	8	8	0,97	1,20	1,25	1,30	1,36		
<b>Kegiatan 13 : Perumusan kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang sosial budaya</b>		DKI JAKARTA						1,41	1,74	1,82	1,89	1,97	Bandep Sosbud	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							1,41	1,74	1,82	1,89	1,97		
	Saran tindak kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang sosial budaya													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang sosial budaya (naskah)		8	8	8	8	8	1,41	1,74	1,82	1,89	1,97		
<b>Kegiatan 14 : Perumusan kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang pertahanan keamanan</b>		DKI JAKARTA						0,92	1,14	1,19	1,24	1,29	Bandep Hankam	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							0,92	1,14	1,19	1,24	1,29		
	Saran tindak kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang pertahanan keamanan													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis bidang pertahanan keamanan (naskah)		8	8	8	8	8	0,92	1,14	1,19	1,24	1,29		
<b>Kegiatan 15 : Perumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu</b>														
		DKI JAKARTA						1,50	3,35	1,93	2,01	2,09	Sahli	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) :</b>							1,50	3,35	1,93	2,01	2,09		
	Saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu (naskah)		15	15	15	15	15	1,50	3,35	1,93	2,01	2,09		
<b>Kegiatan 16 : Pengembangan Sistem Informasi Wantannas</b>														
		DKI JAKARTA						72,91	250,57	138,12	20,67	20,72		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1 :</b>							0,41	0,57	0,62	0,67	0,72	Biro Dangmas	
	Terselenggaranya sistem teknologi dan informasi yang handal dan mutakhir													
	<b>Indikator :</b>													
	Peringkat hasil evaluasi Kemenkominfo terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi Setjen Wantannas (ranking)		5	5	5	5	5	0,41	0,27	0,30	0,31	0,32		
	Jumlah update patch aplikasi Setjen Wantannas (modul)			6	6	6	6		0,30	0,32	0,36	0,40		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2 :</b>							72,50	250,00	137,50	20,00	20,00	Desisnas	
	Tersedianya informasi keamanan nasional yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, aman dan mutakhir													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah policy brief yang disampaikan kepada presiden selaku ketua Dewan Keamanan Nasional (1 policy brief/hari)		92	365	365	365	365							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penguatan infrastruktur TI (paket)		1	1	1	1	1	28,80	80,00	50,00	6,00	6,00		
	Penguatan data center (paket)		1	1	1	1	1	14,16	60,00	27,50	5,00	5,00		
	Penguatan fasilitas situation room (paket)		1	1	1	1	1	16,50	65,00	35,00	5,50	5,50		
	Penguatan aplikasi interligence (paket)		1	1	1	1	1	13,04	45,00	25,00	3,50	3,50		
<b>Program 2: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>								<b>51,90</b>	<b>58,38</b>	<b>62,27</b>	<b>66,45</b>	<b>70,93</b>		K/L
	<b>Sasaran Program (Outcome) :</b>							51,90	58,38	62,27	66,45	70,93		
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Wantannas untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik													
	<b>Indikator :</b>													
	Persentase kualitas tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif dan efisien		100%	100%	100%	100%	100%	19,56	20,93	22,39	23,96	25,64		
	Persentase kualitas tata kelola persidangan dan kehumasan yang efektif dan efisien		100%	100%	100%	100%	100%	0,47	0,80	0,84	0,88	0,92		
	Persentase kualitas tata kelola administrasi umum, pembinaan SDM , organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitas pelayanan umum dan operasional		100%	100%	100%	100%	100%	31,87	36,65	39,04	41,61	44,38		
<b>Kegiatan 1 : Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan</b>		DKI JAKARTA						19,56	20,93	22,39	23,96	25,64	Biro Keuangan	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1 :</b>							0,61	0,65	0,70	0,75	0,80		
	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan yang efektif dan efisien													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah dokumen Perencanaan		5	4	4	4	4	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22		
	Jumlah dokumen Anggaran		15	15	15	15	15	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22		
	Jumlah dokumen Pelaporan Kinerja		2	2	2	2	2	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23		
	Jumlah layanan Perencanaan		12	12	12	12	12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
	Jumlah sosialisasi		6	6	6	6	6	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2 :</b>							0,40	0,43	0,46	0,49	0,52		
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan yang efektif dan efisien													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah dokumen Keuangan		14	14	14	14	14	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah sosialisasi		6	6	6	6	6	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3 :</b>							18,55	19,85	21,24	22,73	24,32		
	Meningkatnya kualitas tata kelola belanja pegawai yang efektif dan efisien													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah layanan perkantoran (belanja pegawai)		12	12	12	12	12	18,55	19,85	21,24	22,73	24,32		
<b>Kegiatan 2 : Pengelolaan Persidangan dan Humas</b>		DKI JAKARTA						0,47	0,80	0,84	0,88	0,92	Biro Dangmas	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1 :</b>							0,08	0,08	0,09	0,09	0,10		
	Meningkatnya kualitas tata kelola persidangan yang efektif dan efisien													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah layanan persidangan		12	12	12	12	12	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2 :</b>							0,39	0,72	0,75	0,78	0,82		
	Meningkatnya kualitas tata kelola kehumasan yang efektif dan efisien													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah Naskah MoU dengan K/L dan instansi terkait			5	5	5	5	-	0,20	0,20	0,20	0,20		
	Jumlah publikasi / pemberitaan		24	24	24	24	24	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31		
	Jumlah pengadaan Buku Perpustakaan (paket)			2	2	2	2	-	0,10	0,10	0,10	0,10		
	Jumlah layanan arsip		12	12	12	12	12	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07		
	Jumlah koordinasi kehumasan		12	12	12	12	12	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11		
	Jumlah Layanan Kehumasan		12	12	12	12	12	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03		
<b>Kegiatan 3 : Pengelolaan Internal Perkantoran dan Kepegawaian</b>		DKI JAKARTA						31,87	36,65	39,04	41,61	44,38	Biro Umum	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1 :</b>							0,35	0,08	0,09	0,09	0,10		
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi umum yang efektif dan efisien													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah layanan administrasi umum		12	12	12	12	12	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10		
	Jumlah layanan operasional pimpinan		12					0,28						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2 :</b>							0,50	2,28	2,32	2,38	2,46		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM, organisasi dan ketatalaksanaan DKN													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah dokumen kepegawaian		2	2	2	2	2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
	Jumlah dokumen kelembagaan DKN			5	5	5	5		1,50	1,50	1,50	1,50		
	Jumlah Pengadaan Pegawai			20	20	22	25		0,25	0,25	0,27	0,30		
	Jumlah Diklat Teknis		12	12	12	12	12	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04		
	Jumlah Diklat Struktural		4	4	4	4	4	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26		
	Jumlah Asessment		23	23	23	23	23	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15		
	Jumlah layanan operasional KORPRI		12	12	12	12	12	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06		
	Jumlah pelantikan pegawai		12	12	12	12	12	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11		
	Jumlah Sosialisasi		6	6	6	6	6	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3 :</b>							0,03	0,83	0,83	0,83	0,83		
	Meningkatnya kualitas tata kelola perlengkapan yang efektif dan efisien													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah laporan BMN		2	2	2	2	2	0,004	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Jumlah dokumen kerumah tanggaan			2	2	2	2		0,30	0,30	0,30	0,30		
	Jumlah layanan pengadaan		12	12	12	12	12	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4 :</b>							30,87	33,03	35,34	37,81	40,46		
	Meningkatnya kualitas tata kelola operasional perkantoran yang efektif dan efisien													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah layanan operasional pimpinan dan perkantoran		12	12	12	12	12	6,09	6,51	6,97	7,46	7,98		
	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin		2	2	2	2	2	15,33	16,40	17,55	18,78	20,10		
	Gedung dan Bangunan		1	1	1	1	1	5,07	5,43	5,81	6,21	6,65		
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		2	2	2	2	2	4,38	4,68	5,01	5,36	5,74		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5 :</b>							0,08	0,19	0,21	0,22	0,24		
	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan pengawasan internal													
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah dokumen pengawasan internal		4	4	4	4	4	0,08	0,19	0,21	0,22	0,24		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6 :</b>							0,04	0,24	0,25	0,27	0,29		
	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan program reformasi birokrasi													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (milyar rupiah)					Unit Kerja Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Indikator :</b>													
	Jumlah dokumen reformasi birokrasi		9	9	9	9	9	0,04	0,24	0,25	0,27	0,29		



Sekretaris Jenderal  
Dewan Ketahanan Nasional

*Waris*

Waris  
Letnan Jenderal TNI



**ANAK LAMPIRAN II**  
**MATRIKS KERANGKA REGULASI**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**TAHUN 2015-2019**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Anak Lampiran II : Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Perpres tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional	<p>Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin variatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antarinstansi menyebabkan koordinasi terkait keamanan nasional terkesan silo, dimana tiap institusi bertindak sendiri-sendiri. Permasalahan ini bermuara pada kebutuhan adanya lembaga semacam dewan keamanan nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional yang terintegrasi. Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya dengan lembaga keamanan nasional yang lainnya</p>	Setjen Wantannas	Kemenhan, KemenPAN&RB, Kemenkum&HAM, Bappenas, Setneg, Setkab	2015

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2	UU Tentang Keamanan Nasional		Kemenhan	Kemenkopolkam, Kemenhan, Setjen Wantannas, Kemenkum&HAM	

Sekretaris Jenderal  
 Dewan Ketahanan Nasional  

  
*Waris*  
 Waris  
 Letnan Jenderal TNI